



---

## **Dampak Anggaran dari Perubahan Organisasi**



---

**Biro Perencanaan dan Keuangan  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Keuangan**



## A. Dampak Anggaran adanya sesuatu kegiatan yang terjadi sesekali.

---

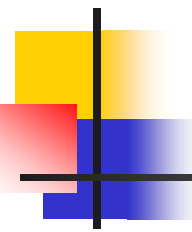
1. Biaya pindah kantor, seperti pengepakan/pengangkutan untuk meubelair, peralatan kantor termasuk pemindahan/pemasangan kembali instalasi komputer serta pemindahan dokumen;
2. Biaya penataan ruangan kerja sesuai kebutuhan unit yang akan menggunakan;
3. Biaya administrasi kepegawaian sekitar 14.000 pegawai karena adanya pemisahan/penggabungan fungsi atau perubahan nama unit organisasi;
4. Biaya penataran apabila ada mutasi pejabat/pegawai ke unit organisasi lain dengan kompetensi fungsi yang berbeda.
5. Biaya percontohan KPPN di beberapa tempat (Medan, Pontianak, Yogyakarta, Makassar, Jayapura).
6. Biaya mutasi pegawai bila terjadi alih tugas antar kota/propinsi.

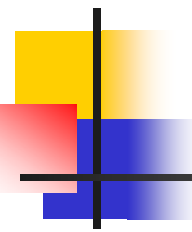


## B. Dampak Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan

---

- a. Karena adanya pemisahan fungsi (misalnya perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran) DIK/DIP T.A. 2004 dipilah sesuai beralihnya fungsi suatu Sekretariat/Direktorat/ Pusat/Biro ke unit organisasi yang berbeda.
  - Pertimbangannya :
    - 1. pembiayaan mengikuti fungsi
    - 2. kesinambungan pendataan realisasi anggaran guna penyusunan LRA
    - 3. menjadi acuan dan bahan pembanding alokasi belanja TA 2005 antara unit organisasi baru.

- 
- b. Pada saat organisasi baru mulai benar-benar efektif, masing-masing Kepala Bagian Keuangan unit organisasi yang lama melakukan Rekonsiliasi dengan KPKN Jakarta II untuk merinci realisasi terakhir MAK berdasarkan DIK yang dipilah, sehingga Kabag Keuangan di unit organisasi yang baru dapat mengetahui sisa dana untuk masing-masing MAK yang masih dapat dicairkan.
- c. DIP tidak perlu dipilah apabila fungsi proyek jelas melekat pada unit eselon II tertentu. Namun bila fungsinya berbeda, dipilah menjadi Bagian Proyek.
- d. Dengan demikian nanti, sebagai contoh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, akan mempunyai sumber-sumber pembiayaan Rutin dari :
- i. DIK eks DJA
  - ii. DIK eks BAKUN
  - iii. DIK eks DJLK
  - iv. DIK eks Setjen



---

e. Sementara itu kantor di Daerah, sebagai contoh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, akan mempunyai sumber-sumber pembiayaan :

- i. DIK eks Kanwil DJA
- ii. DIK eks KASIPA
- iii. DIK eks KAR (BAKUN)
- iv. DIK eks KPDIKR (Bintek)